Sistem dan Dinamika

BAB

3

Demikrasi Pancasila

Pemahaman kalian pasti sudah meningkat setelah mempelajari bab awal sebelumnya, setelah mempelajari bab ini kalian diharapkan untuk bisa memahami dan mengaplikasikan apa yang telah didapat pada bab 2 yakni membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila merupakan dempkrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945. Perlu disyukuri bahwa adanya dan terbentuknya negara Indonesia merupakan kuasa dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, melalui pejuang-pejuang bangsa kita yaitu para pahlawan. Untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang kita di ajak untuk selalu senantiasa mencintai tanah air ini, dengan cara melestarikan salah satunya yaitu demokrasi dan ikut berpartisipasi didalamnya.

Demokrasi negara Indonesia yaitu demokrasi pancasila, demokrasi yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur pancasila, yang digunakan sebagai landasan dasar ideologi bangsa Indonesia.



**Sumber :** [*www.google.com*](http://www.google.com/)

**Gambar 3.1** perwujudan demokrasi di berbagai lingkungan kehidupan.

1. **Hakikat Demokrasi**

1. **Makna Demokrasi**

Istilah “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, dan Kratos yang berarti pemeritahan. Jadi, demokrasi bisa di artikan sebagai pemerintahan ditangan rakyat. Memahami makna demokrasi sangat penting dilakukan, supaya kalian tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Jika kalian salah dalam menafsirkan makna demokrasi maka dalam perwujudannyapun akan salah. Nah, untuk membantu kalian memahami makna demokrasi dan budaya demokrasi berikut ini disajikan puisi karya Fauzi Awaludin simaklah dan maknailah.

Euforia demokrasi menuju babak akhir kini.Detik-detik penentuan masa depan Bangsa mendekat pasti.Wakil rakyat tak lama diganti. Semua kursi terisi. Rakyat tak semua tahu pasti, siapa yang menduduki.

Hanya berandai pasti. Semoga mereka tak lupa janji. Lapangan masih tetap panas. Dua kubu berebut tahta paling atas. Janji janji pun dilontarkan keras. Menggema menggetarkan semua jenis aktifitas. SATU maupun DUA menjanjikan kesejahtera Kata mutiara menghiasi setiap lorong media. Berebut tempat,beradu menarik suara. Meniup angin surga bagi rakyat jelata. Beberapa diantara mereka saling menghina. Saling berbagi dosa, hari telah berganti, bulan suci kita tapaki. Kesalahan tak perlu lagi dicari. Kelemahan tak perlu lagi dikuliti. Lebih baik silih berbagi. Mencegah perpecahan nanti terjadi.

Setelah kalian membaca puisi di atas, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini

1. Mengapa istilah demokrasi maknanya beranekaragam?
2. Dapatkah kita memaksakan pemahaman tentang demokrasi kepada orang lain? Berikan alasanmu
3. Coba kalian identifikasi/temukan nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam puisi di atas
4. Dari nilai-nilai yang sudah diidentifikasikan, nilai-nilai apa asaja yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari?

Apabila kalian cermati , kondisi yang diutarakan dalam puisi di atas mirip dengan kondisi yang terjadi saat ini. Di saat orang saling berebut pandangan mengenai arti demokrasi, tiap orang mengemukakan tiap sudut pandang yang berbeda yang tidak jarang tidak mau menerima sudut pandang orang lain. Tidak jarang ada orang atau kelompok yang mendasarkan arti demokrasi dari sudut agama, politik dan sebagainya. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan pengertian demokrasi secara sistematis mulai dari asal kata sampai pada taraf pelaksanaannya.

Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosa kata dalam bahasa Inggris yaitu democracy. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.



**Sumber** : ropi-komala.blogspot.com

**Gambar 3.2** Ilustrasi demokrasi di Indonesia

Kebanyakan orang mungkin sudah terbiasa dengan istilah demokrasi, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang salah dalam mempresepsikan istilah demokrasi. Bahkan tidak hanya itu, konsep demokrasi bisa saja disalahgunakan oleh penguasa terutama penguasa yang otoriter untuk memperoleh dukungan rakyat agar kekuasaannya tetap langgeng.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa daam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas

Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yag terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara.



**Sumber :** [*www.google.com*](http://www.google.com/)

**Gambar 3.3** Abraham Lincoln Presiden Amerika yang ke-16 (1861-1865)

Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan mirip tetang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang membentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat sehingga kebebasan yag mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain.



**Sumber :** muhammdchoirulrosiqin.wordpress.com

**Gambar 3.4**  Budaya politik, Partisipasi Politik, Sosialisasi Politik

Tugas Mandiri 3.1

Lakukanlah studi literatur dengan membaca berbagai macam buku maupun artikel dari koran atau internet yang berkaitan dengan perbedaan antara negara demokrasi dengan negara otoriter. Tuliskan hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini dan informasikanlah kepada teman-teman yang lain.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Negara Demokrasi** | **Negara Otoriter** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**2. Klasifikasi Demokrasi**

Demokrasi telah dijadikan sebagai sistem olitik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya berbeda-beda bergantung dari sudut pandang masing-masing. Keanekaragaman sudut pandang inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk.

Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi.

1. **Berdasarkan titik berat perhatiannya**

Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk.

1. *Demokrasi formal,* yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi ersamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
2. *Demokrasi material,* yaitu demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangka perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis.
3. *Demokrasi gabungan,* yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material, bentuk demokrasi ii dianut oleh negara-negara non-blok.
4. **Berdasarkan ideologi**

Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan kedalam dua bentuk.

1. *Demookrasi konstitusiona atau demokrasi liberal,* yaitu demokrasi yang didasarkanpada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusiona adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan dibatasi oleh konstitusi.

Info kewarganegaraan

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independent) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Ketiga jenis lembaga ini diperlukan untuk saling mengontrol dan mengawasi berdasarkan prinsip checks and balance (pengawasan dan perimbangan)

**

1. *Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar,* yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham *marxisme-komunisme*. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatanya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Kranenburg demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiardjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah.
2. **Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat**

Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan kedalam dua bentuk.

1. *Demokrasi langsung,* yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaa umum negara atau undang-undang secara langsung.
2. *Demokrasi tidak langsung,* yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalaha yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.



**Sumber :** Rahmatia Nuhung **Gambar 3.5** Ilustrasi Pemilu

1. **Prinsip-Prinsip Demokrasi**

Berbicara mengenai demokrasi tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang kekuasaan rakyat. Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya



**Sumber :** https://satujam.com/prinsip-demokrasi-pancasila

**Gambar 3.5** prinsip demokrasi memiliki sifat saling menghargai terhadap perbedaan

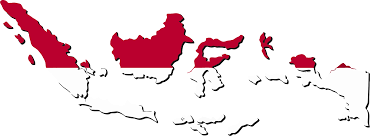
Demokrasi sebagai sistem politik yang saat ini dianut oleh sebagian besar negara di dunia tentu saja memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang lain. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Ilmu Politik* mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun, prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berybah
3. Menyelenggaraka pergantian pemimpin secara teratur
4. Membatasi kekerasan sampai minimum
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan

Syaifullah dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Kewarganegaraan,* suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut.

1. Kedaulatan rakyat
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
3. Kekuasaan mayoritas
4. Hak-hak minoritas
5. Jaminan hak-hak asasi manusia
6. Pemilihan yang bebas dan jujur
7. Persamaan di depan hukum
8. Proses hukum yang wajar
9. Pembatasan emerintahan secara konstitusional
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik
11. Nilai-niai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat

Prinsip-prinsip demokrasi yang diuraikan di atas sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip inilah, sebuah pemeritah yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintah yang demokratis akan sulit ditegakkan.



Tugas Kelompok 3.1

1. Betuklah kelompok belajar yang terdiri atas lima orang.
2. Lakukanlah pengamatan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di sekolah kalian, baik dalam pergaulan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru/kepala sekolah, guru dengan guru maupun guru dengan kepala sekolah
3. Laporan hasil pengamatan kalian secara tertulis dalam bentuk sebuah artikel
4. Informasikan nilai yang kalian peroleh pada orang tua masing-masing.
5. **Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila**
6. **Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila**

****

Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menetapkan paham demokrasi adalah dengan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indoesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan “musyawarah mufakat” dan “gotong royong” dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya.

Apa sebenarnya Demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya rumusan Demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sama lain (bulat dan utuh). Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Notonegoro yang menyatakan Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimana denga prinsip Demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila da Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

1. **Demokrasi Yang Berketuhanan Yang Maha Esa.** Seluk beluk sistem serta prilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Ri harus taat asas, dan konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan Yang Maha Esa.
2. **Demokrasi dengan kecerdasan.** Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru ebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasaan *aqliyah,*kecerdasan rasiona, dan kecerdasan emosional.

Sekilas manfaat demokrasi :

* Menjamin hak-hak dasar
* Adanya kesetaraan setiap warga negara
* Pemenuhan kebutuhan umum
* Pembaharuan kebijakan sosial

****

1. **Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.** Kekuasaa tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.



**Sumber :** <https://moodoggiesmusic.com/pengertian-demokrasi/>

**Gambar 3.6** Kegiatan Pemilu dalam meweujudkan kedaulatan rakyat

1. **Demokrasi dengan *rule of law.*** Hal ini mempunyai empat makna penting. *Pertama,* kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (*legal truth)* bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. *Kedua,* kekuasaan negara memberikan keadila hukum *(lrgal justice)* bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. *Ketiga,* kekuasaan negara menjamin kepastian hukum ( *legal security)* bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. *Keempat,* kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (*legal interest)* seperti kedamaian dan pembangunan. Bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.
2. **Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.** Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada bada-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan (*divison and seperation of power)* dengan sistem pengawasan dan perimbangan ( *check and balances).*
3. **Demokrasi dengan hak asasi manusia.** Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannnya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melaikan terlebih-lebih untuk menigkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.



**Sumber :** artikelsiana.com

**Gambar 3.7** Contoh kasus pelanggaran HAM

1. **Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.** Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari da menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempuyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran (pertimbangan), dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.
2. **Demokrasi dengan otonomi daerah.** Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat usat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas memeritahkan dibentuknya daerah-daerah pada provinsi dan kabupaten/kota. Dengan peraturan pemeritah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urursan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
3. **Demokrasi dengan kemakmuran.** Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, buka hanya soal kewajiban dan tanggug jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945, itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran *(walfere state)* oleh da untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4. **Demokrasi yang berkeadilan sosial.** Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.



**Sumber :** [*www.google.com*](http://www.google.com/)

**Gambar 3.8** Penerapan budaya di lingkungan sekolah merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi pancasila

Apa sebebarnya yang menjadi karakter utama Demokrasi Pancasila? Karakter utama Demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.* Dengan kata lain, Demokrasi Pancasila mengandung tiga karakter utama, yaitu kerakyatan, permusyawarata, dan hikmat kebijaksanaan.

Tiga karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Cita-cita kerakyatan merupakan bentuk peghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Adapun cita-cita hikmat kebijaksanaan merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasakan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemausiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Hikmat kebijaksanaan itu adalah perpaduan antara kebenaran yang berasal dari Tuhan dengan pemikiran manusia. Untuk menanbah pemahaman kalian mengenai nilai yang dikandung demokrasi Pancasila, simaklah kasus berikut.

Seorang tukang judi mengatakan bahwa masalah judi adalah halal, karena urusan judi merupakan urusan usaha manusia untuk mencari nafkah. Pendapat tersebut itu bijak dan benar menurut dirinya sebagai manusia. Tetapi, apakah kalian yakin bahwa Tuhan merestui perbuatan judi seperti yang dikatakan manusia tadi? Jawabannya, tidak. Tuhan tidak merestui perbuatan judi, apapun alasannya. Kalau demikian perbuatan judi tidak mengandung nilai hikmat. Jika demikian maka bertentangan dengan nilai Demokrasi Pancasila.

Dari kasus tadi tergambar oleh kita bahwa Demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Apa nilai lebihya? Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari pancasila yaitu :

1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Demikianlah beberapa nilai lebih demokrasi Pancasila yang merupakan corak khas budaya demokrasi di Indonesia. Pelaksanaannya bagaimana? Tentunya berpulang kepada kemauan kita sendiri. Apakah kita mempunyai kemauan untuk melaksanakannya dalam menyelesaikan suatu persoalan atau tidak?

Tugas Kelompok 3.2

1. Menurut kalian apakah pemilukada langsung yang dilaksanakan pada saat ini sesuai dengan rinsip-prinsip demokrasi pancasila? Berikan alasannya
2. Kalian tentunya sering mendengar atau membaca berita, beberapa pelaksanaan Pemilukada Langsng diakhiri dengan kericuhan antar pendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Menurut kalian apa saja penyebab terjadinya hal tersebut?
3. Selain itu, hasil Pemilukada langsung juga banyak yang tidak diterima oleh pasangan calon yang kalah. Mereka melayangkan gugatan hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi. Menurut kalian apa saja yang menyebabkan tidak diterima hasil Pemilukada oleh pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang kalah dalam pemilihan? Apakah sikap tidak menerima kekalaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Berikan alasan kalian.
4. Coba kalian ajukan beberapa solusi untuk menyelesaikan kekisruhan dalam pelaksanaan Pemilukada di Indonesia

**2. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia**

Pada bagian sebelumnya,telah dibahas secara singkat karakteristik demokrasi Indonesia. Hal ini secara otomatis akan memunculkan suatu anggapan dalam benak kita bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Akan tetapi, muncul suatu pertanyaan apakah benar negara ini adalah negara demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunaka sudut pandang *normatif* dan *empirik.*

Dalam sudut pandang *normatif,* demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal sebuah ungkapan “*pemerinthan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*” ungkapan normtif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagi pemerintahan Republik Indonesia. Apakah secara noratif, negara kita sudah memenuhi kriteria sebagai negara demokrasi? Jawabannya **sudah.** Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya:

1. Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum diamandemen) berbunyi “*kedaulata adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawarahan Rakyat”*
2. Dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah diamandemen) berbunyi *“kedaulata berada di tengan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*
3. Dalam kostitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 :

* Ayat (1) berbuyi “ *Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”*
* Ayat (2) berbunyi “*Kekuasaan kedaulata Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintahan bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”*

1. Dalam UUDS 1950 pasal 1 :

* Ayat (1) berbunyi “ *Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demookratis dan berbentuk kesatuan”*
* Ayat (2) berbunyi *“ Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tanga rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”*



**Sumber** : [www.google.com](http://www.google.com/) **Gambar 3.9** Ilustrasi Kitab UU hukum

Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jela bahwa secara normatif Indonesia adalah negara Demokrasi. Akan tetapi yang menjadi persoalan apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Nah, untuk melihat apakah suatu sistempemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar dalm bukunya yang berjudul Politik Indonesia; Transmisi Menuju Demokrasi (2004;7-9) berikut ini :

1. *Akuntabilitas,* dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempunya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah prilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan yang akan dijalaninya. Pertanggungjawaban itu tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas, yaitu prilaku anak dan istrinya, juga sanak keluarganya terutama yang berkaita dengan jabatannya.
2. *Rotasi kekuasaan.* Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yag selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali.
3. *Rekuitmen politik* yang terbuka.untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, dierlukan satu sistem rekruitmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuri syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut.
4. *Pemilihan umum.* Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemiu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekruitmen politik. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempuyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas untuk mengikuti segala macam aktivitas pemilihan seperti kampanye dan menyaksikan penghitungan suara.



Info Kewarganegaraan

Unsur-unsur Rule of Law

Berlakunya supermasi hukum, perlakua yang sama di depan hukum, dan terlindunginya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan pengadilan

1. *Pemenuhan hak-hak dasar.* Dalam suat negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat serta hak untuk menikmati pers yang bebas.

Kelima indikator diatas merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukuran dari sebuah negara demokratis. Dari indikator-indikator tersebut, apakah semuanya sudah diterapkan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaa tersebut, kita bisa melihatnya dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu pada pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan orde baru, dan pemerintahan orde reformasi. Mengapa demikian? Karena pada masa-masa tersebut demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia mengalami perkembanga yang fluktuatif. Dengan berdasarkan pada indikator-indikator yang disebutkan diatas, berikut ini dipaparkan perkembangan demokrasi pada masa-masa tersebut, sehingga pada akhirnya kita dapat menjawab sendiri pertanyaan apakah Indonesia negara demokrasi atau bukan?

1. **Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945-1949**

Kalau kita mengikuti risalah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka kita akan melihat begitu besarnya komitmen para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad Yamin dengan beraninya memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka, dan Ir.Soekarno dengan penuh keyakinan memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan mereka yang sangat besar tersebut timbul karena dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga termasuk merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan.

Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini (1945-1949), pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup.



**Sumber :** [*www.google.com*](http://www.google.com/)

**Gambar 3.10** Jendral Soedirman memimpin perang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia

Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan, pemilihan umumbelum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah agenda politik utama.

Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada eriode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara, sudah sejak semula, mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu kita menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku dan kedaerahan. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaanya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

1. **Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada Periode 1949-1959**

****

**Sumber :** layanan-guru.blogspot.com

**Gambar3.11** suasana politik pada periode 1949-1959

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. *Pertama,* pergantian UUD 1945 dengan konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi quasi parlemente. *Kedua,* pergantian konstitusi RIS dengan undang-undang dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 agustus 1950 sampai dengan 5 juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer.

Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannnya dalam kehidupan politik di Indonesia. *Pertama,* lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakan jabatannya, meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, seperti yang terjadi kepada Ir. Djuanda Kartawidjaja yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya kepada parlemen.

*Kedua,* akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media masa sebagai alat kntrl sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merrupakan contoh konkrit dari tingginya akuntabilitas tersebut.

*Ketiga,* kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk pperkembangan secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini, hampir 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekruitmen, baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal rekruitmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Sehingga partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya.

*Keempat,* sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali yaitu pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kompetisi antar politik berjalan sangat intensif dan fair, serta yang tidak kalah pentingnya setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas tanpa ada tekan atau rasa takut

*Kelima,* masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilu. Kebebasan pers juga dirasakan dengan baik. Demikian juga dengan kebebasan berpendapat. Masyarakat mampu melakukannya tanpa rasa takut menghadapi resiko, sekalipun mengkritik pemerintah dengan keras. Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh Dr. Halim. Mantan perdana mentri yang menyampaikan surat terbuka dan mengeluarkan semua isi hatinya dengan kritikan yang sangat tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan presiden Soekaro. Surat tersebut tertanggal 27 Mei 1955. Petikan isi surat tersebut adalah sebaga berikut

Dikarenakan hubungan kita selama 3 atau 4 tahun yang terbatas pad satu atau dua pertemuan setahun..., saya terpanggil untuk menggunakan bentuk “surat terbuka” ini guna meminta perhatian saudara terhadap keadaan sekarang ini, yang saya yakini bukan hanya luar biasa pelik, tapi hampir menjadi ledakan.

Mungkin saudara telah megetahui hal-hal ingin saya sebutkan disini atau yang saya sudah sampaikan kepada saudara untuk di perhatikan. Walaupun deikian, saya rasa perlu hal-hal itu dinyatakan kembali, karena saya tidak adanya langkah-langkah yang ditempuh untuk memperbaiki keadaan ini. Sebalik, keadaan-keadaan buruk yang berlangsung di negeri kita sekarang setiap hari semakin buru.

Akhirnya, saya ingin menyatakan, bahwa saya gembira ketika mendengar saudar menyatakan bahwa pengembalian Irian Barat ke Indonesia meruapakan “obsesi” bagi saudara. Tetapi saya akan lebih gembira kalo saya mendengar saudara menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat juga menjadi obsesi saudara.

Saya berharap, saudara membaca surat ini dengan semangat kejujuran.

(Dikutip dari buku politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi karangan Affan Gaffar,2004:15-16)

Setelah kalian menelaah surat tersebut, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam surat tersebut yang dapat kalian teladani dalam kehidupan sehari-hari ?

*Keenam,* pada masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Keenam indikator tersebut merupakan ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa pemerintahan parlementer. Akan tetapi, kesuksesan tersebut tidak berumur panjang. Demokrasi parlementer hanya bertahan selama sembilan tahun seiring dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan kembali kepada UUD 194. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong, sehingga beliau menganggap bahwa sistem demokrasi ini telah gagal mengadopsi nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa demokrasi parlementer mengalami kegagalan? Banyak sekali para ahli mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Dari sekian banyak jawaban tersebut, ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. *Pertama,* munculnya usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk emerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Melalui konsepsi ini preside membentuk dewan nasional yang melibatkan semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Konsepsi Presiden dan Dewan Nasional ini mendapat tantangan yang sangat kuat dari sejumlah partai politik terutama Masyumi dan PSI. Mereka menganggap bahwa pembentukan Dewan Nasional merupakan pelanggara yang sangat fundamental terhadap konstitusi negara, karena lambang tersebut tidak dikenal dalam konstitusi. *Kedua,* Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan Ideologi Nasional, karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam sebagai Ideologi negara dan kelompok lain menginginkan pancasila sebagai Ideologi negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak ernah tercapai. *Ketiga,* dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut setiap konflik yang tercapai cenderung meluas melewati batas wilayah, yang ada pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik. *Keempat,* basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Struktur sosial yang dengan tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Akibatnya semua komponen yang di masyarakat sulit dipersatukan sehingga hal tersebut menganggu stabilitas pemerintah yang berdampak pada begitu mudahnya pemerintahan yang sedang berjalan dijatuhkan atau diganti sebelum masa jabatannya selesai.

1. **Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1959-1965**

Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia kedalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti, karena landasan konstitusional tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional.

Presiden Soekarnosebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno suatu dekrit pada *5 juli 1945*. Dalam dekrit tersebut, presiden menyatakan membubarkan Dewan Konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Dekrit presiden terebut mengakhiri era Demokrasi Parlementer, yang kemudain membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi oleh Presiden Soekarno disebut sebagai *Demokrasi Terpimpin.* Maksud konsep terpimpin ini, dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut demokrasi tidak lain merupakan perwujudan kehendak-kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Adapun karakteristik utama dari perpolitikan pada era deokrasi terpimpin adalah :

*Pertama,* mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik, bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah (karena Pemilihan Umum tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia.

*Kedua,* dengan terbentuknya Dewa Perwakila Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Karena, DPR-GR tidak lebih hanya merupakan instrumen politik lemnaga kepresidenan. Proses rekruitmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden.

*Ketiga,* hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menantangnya. Sejumlah lawan politiknya menjadi tahan politik presiden, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan Soaialis.

*Keempat,* masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh pemerintaha seperti misalnya Harian *abadi* dari Masyumi dan Harian *pedoman* dari PSI.

*Kelima,* sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah–daerah memiliki otonomi yang terbatas.

Dari lima karakter diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi terpimpin keluar dari aturan yang benar. Bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetami dipimpin oleh institusi keprisidenan yang sangat otoriter yang sagat jauh dari nilai-nilai universal. Masa ini disebut sebagai masa *suram* demokrasi di Indonesia.

1. **Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1965-1998**

Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968, ketika Jendral Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep *Demokrasi Pancasila.* Visiutama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehdupan masyarakat Indonesia.



**Sumber** : titiknol.co.id

**Gambar 3.12** 27 Maret 1968 Pelantikan Presiden Soeharto

Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan- perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin dibawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokrasi. Harapan rakyat tersebut tentu saja ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai pemeran utama Orde Baru dipandang rakya sebagai sesokok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini karena beliau berhasil membubarkan PKI, yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini. Selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitasa keamanan negeri ini pasca pemberontkaan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto.

Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Karena, sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja (sama sama otoriter). Dalam perjalanan politik pemerintahan orde baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya yang bersifat suprasturktur maupun yang bersifat infrasturktur selain itu juga preside Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki siapapun seperti pengemban SuperSemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI.

1. **Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1998-Sekarang**

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis Multidimensi. Yang diawali dengan badai krisis Moneter yang tidak kunjung reda. Yang mengakibatkan terjadinya krisis politik, dimana tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi nusantara. Bisa ditebak, pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan presiden Soeharto terprosok kedalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik diluar maupun dalam negri. Dari dunia Interasional, Amerika Serikat secara terbuka meminta presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dalam negri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh Mahasiswa turun kejalan menuntut presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Puncaknya ketika tidak kurang dari lima belas ribu mahasiswa mengambil alih gedung DPR/MPR yang mengakibatkan proses politik nasional praktis lumpuh. Saat akhir presiden Soeharto ingin menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan menawarkan berbagai langkah, antara lain reshuffle (rombakan) kabinet dan membentuk Dewan Reformasi, tetapi preside Soeharto tidak memiliki ilihan lain kecuali mundur dari jabatannya.

Kamis 21 Mei 1998, Presiden Soeharto di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai Presiden dan dengan menggunakan pasal UUD 1945, residen Soeharto segera mengatur agar wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya dihadapan MA, karena DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih mahasiswa. Saat itu kepemimpinan nasional segera beralih ke Habibie.

Dalam masa pemerintahan Habibie ada beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

*Pertama,* diberikannya ruang pers sebagai ruang publik. *Kedua,* diberlakukannya sistem multi partai dalam pemilu 1999.



**Sumber** : [www.tugassekolah.com](http://www.tugassekolah.com/)

**Gambar 3.13** Suasana Politik pada masa sekarang

Tugas Mandiri 3.2

Setelah kalaian memahami materi di atas, coba kalian buat kesimpulan mengenai karakteristik pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya. Tuliskan kesimpulan kalian dalam tabel di bawah ini

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Demokrasi | Periode 1945-1949 | Periode 1949-  1965 | Periode 1959-1965 | Periode 1965-1998 | Periode 1998-sekarang |
| 1 | Akuntabilitas |  |  |  |  |  |
| 2 | Rotasi kekuasaan |  |  |  |  |  |
| 3 | Pola rekruitmen politik |  |  |  |  |  |
| 4 | Pelaksanaan Pemilu |  |  |  |  |  |

1. **Membangun Demokrasi untuk Indonesia**
2. Pentingya kehidupan yang demokratis

Setelah kalian membaca dan memahami uraian materi sebelumnya, coba kalian pikirkan apakah negara kita merupakan negara yang demokratis? Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut pahamilah uraian materi berikut.

1. Persamaan kedudukan dimuka Hukum

Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, hukum dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa dan berani menghukum siapa saja yang bersalah.



**Sumber :** [https://laskarmim.wordpress.com](https://laskarmim.wordpress.com/)

Gambar 3. Persamaan Kedudukan di Muka Hukum.

1. Partisapisi dalam pembuatan keputusan

Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Maka pemerintahan dan DPR menetap UU yang mengatur penyampaian pendapat dimuka umum.

1. Distribusi pendapatan secara adil

Semua bidang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan termasuk didalam bidang ekonomi. Pada kesempatan lain pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Dengan program tersebut diharapka terjadi distribusi pendapatan yang adil diantara warga negara Indoensia.

1. Kebebasan yang bertanggungjawab

Terdapat empat kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasa berkumpul.

Tugas Mandiri 3.2

Coba kalian amati dan rasakan bagaimana pelaksanaan karakteristik negara demokratis di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara. tulislah jawaban kalian dalam tabel berikut

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karakteristik Negara Demokrasi** | **Penerapan dalam Lingkungan** | | | |
| **Keluarga** | **Sekolah** | **Masyarakat** | **Negara** |
| Persamaan kedudukan di depan hukum |  |  |  |  |
| Partisipasi dalam pembuatan keputusan |  |  |  |  |

**Refleksi**

Setelah kalian mempelajari materi demokrasi, tentunya kalian semkin paham betapa pentingnya mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian renungkan. Sudah sejauh manakah kalian melaksanakan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Coba uraikanlah dalam satu paragraf perwujudan nilai-nilai demokrasi yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RANGKUMAN

1. **Kata Kunci**

Kata kuci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **Demokrasi, Prinsip Demokrasi, dan Demokrasi Pancasila**

1. **Intisari Materi**
2. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemeritahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
3. Pada umumnya menurut Henri B Mayo, demokrasi mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, penyelenggaraan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Inti dari Demokrasi Pancasila adalah sila keempat
5. Pada hakikatnya negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum.

Uji Kompetensi Bab 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi?
2. Jelaskan macam-macam demokrasi
3. Jelaskan nilai demokrasi Pancasilla jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya
4. Buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi baik secara normatif maupun empirik
5. Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi